

Forum Perencanaan Pembangunan kembali hadir, kali ini dalam suatu edisi khusus Desember 2001-Juni 2004 yang memuat 6 artikel dengan satu tema mengenai pergeseran paradigma perencanaan dari *top-down* ke *bottom-up*, bersama-sama dengan era dilaksanakannya otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2000. Meskipun telah terbit Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang memberikan revisi cukup mendasar bagi pelaksanaan otonomi daerah, artikel-artikel dalam terbitan ini masih sangat kental dijiwai oleh semangat pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Dari enam buah artikel yang dimuat dalam edisi khusus ini dapat ditarik suatu deliniasi yang cukup tegas antara tiga artikel yang memberikan penekanan pada tataran konsep di satu pihak dan tiga artikel lainnya yang menggambarkan pengalaman empirik dalam perencanaan pembangunan, yang mengambil kasus pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan pengelolaan beberapa jenis sumberdaya alam, di pihak lainnya.

Tulisan Muhammad Baiquni menyoroti tentang sesat pikir dalam praktek dan pemikiran perencanaan pembangunan regional di Indonesia yang kebanyakan dilakukan dengan dasar teori-teori maupun pengalaman empirik yang diturunkan dari pengalaman negara barat dengan setting wilayah kontinen. Penulis juga mengingatkan bahwa otonomi dalam setting wilayah kepulauan berpotensi lebih besar mendorong munculnya ancaman disintegrasi selain membuka peluang dalam pembangunan yang lebih menghargai keragaman dan lokalitas. Reorientasi perencanaan pembangunan regional dalam setting benua maritim seperti Indonesia tampaknya sangat diperlukan dengan tetap menghargai diversitas masyarakat dengan budayanya.

Dengan semangat yang sama Bakti Setiawan mengemukakan pentingnya menghargai keragaman dalam bentuk mekanisme dan proses partisipasi masyarakat di dalam pembangunan. Diharapkan pemerintah bersama masyarakat dalam otonomi daerah akan mampu berkreasi untuk mengembangkan partisipasi dalam pembangunan yang paling efektif. Selanjutnya diingatkan juga bahwa hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bukan secara otomatis diperoleh, tetapi membutuhkan perjuangan secara politis. Oleh karena itu masyarakat harus berupaya untuk meningkatkan ketrampilan politiknya agar dapat berpartisipasi secara efektif.

Di atas semua proposisi yang diajukan oleh kedua penulis di atas, Tedjojuwono Notohadikusumo menekankan implikasi etika dalam kebijakan pembangunan. Pemahaman kebijakan pembangunan dan kemahiran penerapan pirantinya memerlukan suatu nalar yang dapat menilai sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah. Untuk mengembangkan nalar seperti itu diperlukan pegangan etika yang pada dasarnya merupakan asas-asas moral. Kebijakan dalam pembangunan tidak dapat dialihkan dari satu negara ke negara lain, bahkan dari satu kawasan ke kawasan lain, karena kebijakan itu merupakan cerminan keunikan

kehidupan sosial, ekonomi dan budaya setempat termasuk tradisi, kebiasaan dan kepercayaan.

Artikel yang memberikan pembahasan pada tingkat empirik mengenai keunikan karakteristik dan pengelolaan sumberdaya lahan disajikan oleh Suratman Worosuprodjo. Lahan sebagai sumberdaya alam di Kabupaten Sleman diklasifikasikan menurut tingkat kemampuannya di dalam rangka mencapai rekomendasi tentang penggunaan yang paling sesuai dengan nilai lokalitas setempat. Selanjutnya artikel Sri Rungiyarsih membahas tentang factor-faktor determinan sosial, ekonomi dan fisik wilayah dalam pengelolaan DAS Bengawan Solo. Artikel Widiasmoro dkk pada bagian terakhir terbitan ini menyajikan beberapa pengalaman empirik eksplorasi bahan galian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Para penulis menegaskan bahwa studi mengenai ekplorasi berbagai jenis bahan galian perlu ditindaklanjuti agar dapat segera diperoleh manfaatnya bagi masyarakat. Diingatkan agar pemerintah dalam otonomi daerah tetap memiliki komitmen untuk mempertahankan sebanyak-banyak nilai tambah dari bahan galian yang dapat dinikmati masyarakat dengan cara melakukan kegiatan pengolahan antara maupun pengolahan akhir melalui pendirian berbagai pabrik.

Akhirnya, keenam tulisan di atas bermuara pada satu arah baru konsep dan pemikiran dalam perencanaan pembangunan yang menghargai pentingnya keragaman pada tingkat makro dan keunikan serta prakarsa lokal pada tingkat mikro sebagai pilar-pilar yang utama dalam proses perencanaan yang lebih partisipatoris dan lebih sensitif terhadap dinamika sosial politik yang terkait. Apakah kecenderungan ini akan berlanjut dan membawa kesejahteraan sesuai aspirasi masyarakat atau akan surut tergilas semangat sentralisasi dan kemudian kembali ke paradigma lama atau justru melahirkan paradigma baru, hanyalah waktu yang akan mengujinya. Selamat membaca.

Redaksi